

PENGESAHAN NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor. 578/Pdt.G/2007/PA.Pas)

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 033	No. REG : S-2009/AS/033 ASAL BUKU : TANGGAL :

AS

Oleh :

M. YUSUF HARIYANTO
NIM: C01304133

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA

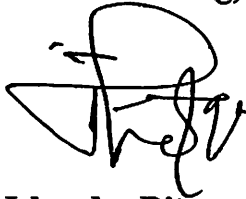
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Yusuf Hariyanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Pebruari 2009

Pembimbing,

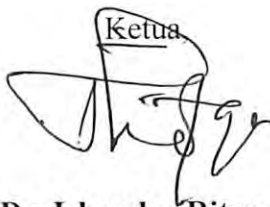
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Iskandar Ritonga', written over a horizontal line.

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 150 291 148

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Hariyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

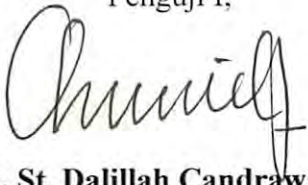
Ketua


Dr. Iskandar Ritonga
NIP. 150 245 503

Sekretaris,

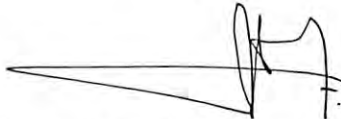

Siti Musfiqoh, M. El.
NIP. 150 377 728

Penguji I,



Dr. Hj. St. Dalillah Candrawati, M.Ag.
NIP. 150 240 376

Penguji II,



Titik Triwulan Tutik, SH, M.H.
NIP. 150 300 193

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga
NIP. 150 245 503

Surabaya, 24 Pebruari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Harianto

Nim : C01304133

Semester : IX

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : JL. Klampisngasem 82 d Sukolilo Surabaya Jawa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Permohonan *Isbat* Nikah Dan Poligami Yang Diputuskan Dalam Satu Majelis di Pengadilan Agama Pasuruan (Putusan Nomor 578/Pdt.G/2007/PA.Pas)” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surabaya, 12 Pebruari 2009



M. Yusuf Harianto

NIM: C013041330

BAB II	PENGESAHAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANG	
	PERKAWINAN DI INDONESIA	18
A.	Pengesahan Nikah Menurut Perundang-Undangan	18
1.	Monogami	18
2.	Poligami	20
a.	Pengertian Poligami	20
b.	Alasan-Alasan Poligami	21
c.	Tata Cara Izin Poligami	24
B.	<i>Isbāt</i> Nikah	32
1.	Pengertian <i>Isbāt</i> Nikah	32
2.	Dasar Hukum <i>Isbāt</i> Nikah	35
3.	Faktor yang Menyebabkan Pengajuan <i>Isbāt</i> Nikah	49
4.	Alasan-Alasan Pengajuan <i>Isbāt</i> Nikah	51
BAB III	PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA	
	PASURUAN TERHADAP PENGESAHAN NIKAH DALAM	
	PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA	
	PASURUAN	53
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan	53
1.	Status Pengadilan Agama Pasuruan	53
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan	54
3.	Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan	55

4. Kewenangan Absolute dan Kewenangan Relative	
Pengadilan Agama Pasuruan	55
B. Proses Penyelesaian Permohonan <i>Isbāt</i> Nikah dan Poligami	59
C. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami.....	68
D. Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami	70
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PENGESAHAN NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI	76
A. Analisis Terhadap Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami	76
B. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Majelis Hakim dalam Memberikan Ijin Poligami/Pengesahan Poligami.....	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial keagamaan dikenal adanya peristiwa nikah. Hal tersebut merupakan sunnatullah antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda yang terdapat daya tarik untuk hidup dalam rumah tangga. Pasangan makhluk ini bila dilihat dari segi fisik maupun psikis terdapat perbedaan, namun, secara biologis keduanya saling membutuhkan untuk hidup berpasang-pasangan yang secara umum berlaku bagi makhluk Tuhan.

Pernikahan di dalam pandangan agama Islam adalah suatu ibadah dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah, seorang muslim akan mendapatkan balasan baik dan pahala. Hal itu jika ia melakukan pernikahan dengan niat yang ikhlas dan dengan tujuan yang benar, bukan karena dorongan nafsu hewani.¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat. Pernikahan itu tidak hanya sebagai salah satu cara untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan

¹ Syaikh Ash-Shabuni, *Hadiyyatul Afrāh Lil 'Arūsain Az-Zawājul Islāmīl Mubakkir: Sa'adah wa Haşānah*, di Terjemahkan oleh. Ikililah Muzayyanah Djunaedi, (Jakarta: Mustaqim, 1995), h. 47-48

- a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan harus dilakukan secara sah menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga harus sah menurut negara. Artinya, suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya juga harus

⁸ Undang-Undang Perkawinan, h. 6-7

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Pengadilan Agama Pasuruan, telah menerima perkara Pengesahan Nikah dalam Pernikahan Poligami yang tercatat dalam buku Register Perkara Nomor : 578/Pdt.G/PA.Pas. Adapun yang dimaksud dengan *isbat* nikah adalah pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami melalui pengadilan agama. *Isbāt* nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan izin poligami adalah izin yang diberikan Pengadilan Agama kepada suami untuk mengawini beberapa (lebih dari satu) orang istri. Izin poligami diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Permohonan *isbāt* nikah dan izin poligami dilihat dari jenis perkaranya adalah berbeda dan tidak bisa digabung. Permohonan *isbāt* nikah adalah termasuk perkara voluntair¹³ dan izin poligami adalah termasuk perkara kontensius.¹⁴ Produk hukum dari pengadilan tentang kedua jenis perkara tersebut

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, h.7-8

¹³ Perkara voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 41

¹⁴ Perkara kontennius yaitu perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. *Ibid.*

Melihat fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tersebut, untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menerima pengesahan nikah dalam perkawinan poligami. Inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian yang saya lakukan.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses persidangan pengajuan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama di Pasuruan?
2. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami?
3. Bagaimana analisis terhadap hasil putusan majelis hakim sehingga mengabulkan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami tersebut?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pikiran pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *ahwalus syaksyah* tentang masalah pengesahan nikah dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara pengesahan nikah dalam perkawinan poligami.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini penulis akan menguraikan maksud dari Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ekonomi Islam perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu: pengambilan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang ada kaitannya dengan pembahasan
- b. Interview yaitu: suatu teknik penggalan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini, ketua pengadilan, anggota majelis hakim, dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Pasuruan.

Bab *Ketiga* Merupakan hasil penelitian terhadap putusan majelis hakim terhadap *isbāt* nikah dan poligami yang diputuskan dalam satu majelis yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, status Pengadilan Agama Pasuruan, letak geografis Pengadilan Agama Pasuruan, kedudukan dan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, proses penyelesaian pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, alasan dan dasar hukum majelis hakim yang digunakan dalam pengabulan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, putusan pengadilan agama tentang pengesahan nikah dalam perkawinan poligami.

Bab *kelima* merupakan penutup berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

1. Monogami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari penggalan kata *mono* atau *monus* yang berarti satu, tunggal, tidak ada yang lain dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan atau kawin¹

Hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suamidalam waktu yang sama (asas monogami). Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 3.

¹ Simorang Jungkir, Rudy T. Erdwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 100

18

- Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan tersebut mengacu pada pokok perkawinan, itu dilaksanakan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹³ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005), h. 252-253

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.

- b. (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nonor Tahun 1974.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

(Pasal 56 ayat 1-3)

Menurut Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Bab 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷ mengatur izin poligami sebagai berikut;

- a. Apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.
(Pasal 40)

- b. (1) Kemudian pengadilan memeriksa mengenai Ada atau tidaknya alasan- alasan yang memungkinkan seseorang seorang suami kawin lagi ialah:

- a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Wilpres, 2007), h. 44-46

- b) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - (2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan siding pengadilan.
 - (3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
 - (4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- (Pasal 41 ayat 1-4)
- c. (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

b. Kewenangan Relative PA

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1) Surat Permohonan izin beristri lebih dari satu harus memuat:

- 2) Permohonan izin poligami merupakan masalah kotentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam register Induk Perkara Gugatan

1) Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan.

- ### e. Pemeriksaan

- 2) Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, Pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

1) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat 1 HIR).

- ### g. Pembuktian

- 1) Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:**

- a) Ada atau tidaknya alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - (1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - (2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - (3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang dinyatakan di depan sidang.
 - c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan mengenai penggasilan suami yang ditandatangani oleh Bendahara tempat bekerja, atau
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 - d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- 2) Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak

hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

3) Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:

- a) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
- b) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 Tahun; atau
- c) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

i. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. (Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ekonomi Islam).

B. *Isbāt* Nikah

1. Pengertian *Isbat* Nikah

Isbāt nikah berasal dari dua rangkaian kata, *isbāt* dan nikah. Kata *isbāt* adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab “*asbata, yusbitu isbātan*”, yang berarti, penetapan.²¹

²¹ Rosadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1995). h. 827-828

Dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *Isbat* nikah adalah suatu penetapan keabsahan nikah yang diajukan kepengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya:²⁴

- Berdasarkan pengertian diatas *isbāt* secara umum adalah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar Suami Istri yang telah melakukan perkawinan yang disebutkan dalam permohonan dinyatakan sah.

²⁴ IKPI, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Fokusmedia, 2005). h. 8

²⁶ *Ibid.*,.

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa.

- d) Dalam Pasal 58 ayat 1 disebutkan, pengadilan mengadili dan menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Pada ayat 2 dijelaskan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- e) Dalam Pasal 59 ayat 1 disebutkan, sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan lasan-alasan penting yang dicatat dalam birta acara sidang, memeriksa bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- f) Dalam Pasal 60 disebutkan penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- g) Dalam pasal 62 ayat 1 disebutkan, segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁸

4) Peraturan Pemerintah Nomor. 1 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

a) Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan, pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk.

b) Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan, akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu dan juga telah ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

c) Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan, pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

²⁸ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. (Surabaya: Arkola, 2005), h. 6

5) Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama disebutkan Tahun 2007, (Buku II). Dalam Buku pedoman tersebut disebutkan tentang pengesahan perkawinan/ *iṣbāt* nikah sebagai berikut:

- a) **Aturan pengesahan nikah/ *isbat* nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, (PPN) yang berwenang.**
- b) **Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam dan Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.**
- c) **Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a**

Tahun 1974 tentang Perkawinan. akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk kepentingan perceraian. Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak di praktikan di Pengadilan Agama.

- d) Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, memperoleh hak waris, atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, pengadilan agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/*isbāt* nikah, agar proses pengesahan nikah/*isbāt* nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
- e) Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/*isbāt* nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
- (1) Permohonan *isbāt* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami atau istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut

- (2) Proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbāt* nikah, maka pihak suami istri dapat mengupayakan kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan yang dilakukan salah seorang suami atau istri bersifat kontesius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan *isbāt* nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontesius, dengan mendudukan suami dan istri dan/ahli waris lain sebagai termohon.

- (6) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *isbāt* nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *isbāt* nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan, apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbāt* nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan *isbāt* nikah.
- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbāt* nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara *isbāt* nikah tersebut selama perkara belum diputus.

(14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.

(15) Untuk keseragaman amar putusan antara dengan

Yang dilaksanakan pada tanggal di.....²⁹

b. Menurut Syar'i

Pada mulanya Syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara jelas tentang adanya pencatatan perkawinan ini. Berbeda dengan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintakan untuk menetapkan pencatatan karena adanya tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Hukum di Indonesia mengaturnya dengan berbagai peraturan. Oleh sebab itu dalam hal *isbāt* nikah ini diqiyaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ

²⁹ Mahkamah Agung. *Pedoman Tehnisi Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II, Edisi 2007 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), h. 142-147

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - 1) Perkawinan;
 - 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - 3) Wakaf dan shadaah
 - 4) Ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Ekonomi Islam)²
- b. Bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

² Ekonomi syariah. sector ekonomi syariah yang lebih luas mencakup bank syariah. lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangkah menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا بَاعْتُمْ وَلًا يُمْسِرَ وَلَا يُفَارِغْ يَدَيْهِمَا فَمِنْ حَقِّ الشَّهَادَةِ أَنْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا إِذَا بَاعَ غُلَامًا فَغُلَامٌ كَانَ اسْمُ الْغُلَامِ عَدْنًا وَغُلَامٌ قَدْ بَاعَ غُلَامًا بِغُلَامٍ فَآلٌ أَيُّ شَيْءٍ مِمَّا يَدْعُونَ بِكُنَّ إِذْ يَبْلُغُونَ الْحُلُمَ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ يَنْفَرُ مِنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ مِنَ اللَّهِ فَسَوْفَ يَكُونُ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingtkannya. Janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil ataupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu amalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antarakamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Īsbāt nikah mempunyai tujuan untuk mendapatkan Akta Nikah (bukti), yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu. Dalam kaidah Islam, akta nikah sangatlah penting, karena dengan adanya Akta maka perkawinan dapat dibuktikan. Dengan demikian bagi mereka tidak mempunyai akta nikah dianjurkan untuk mengajukan permohonan atas perkawinan mereka agar dapat mendatangkan masalah di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip.

دَرءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ غَالِبًا

³³ Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Kairo: Dar Al-Kutub), h. 2

Pemerintah dalam mengatur tentang *isbāt nikah* yang dibuktikan dengan Akta Nikah berdasarkan metode *istislah* atau *maslahah mursalah*.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, suatu perkawinan selain harus mengikuti tata cara yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya juga harus mengikuti tata cara yang di tentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, tidak semua perkawinan memperoleh Akta Nikah, contohnya adalah perkawinan di bawah tangan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan/ Nikah (PPN) dan tidak mempunyai akta nikah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. bukanlah sebagai syarat formil untuk mengajukan *isbat* nikah. akan tetapi dalam pasal tersebut hanya sebatas syarat materiil dimana suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun Hukum Islam. Sedangkan sebagai syarat formil diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 272

Tidak adanya akta nikah bagi pasangan suami istri menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan *isbāt* nikah, adapun faktor-faktor yang mejadi penyebab terjadinya permohonan *isbāt* nikah diatur dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

- ¹⁸ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 181

- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut peradilan agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Mengenai perkawinan rinciannya tercantum dalam Undang-Undang pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam yaitu: “mengenai perkara” sengketa perkawinan antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari Satu
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun dalam hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dari garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Depensasi Kawin.
- d. Pencegahan Perkawinan
- e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah
- f. Pembatalan Perkawinan
- g. gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h. Perceraian karena Talaq
- i. Penyelesaian Harta Bersama

- ³ *Ibid.*, h. 107-108

Setelah menikah Pemohon I dan Termohon hidup rukun dan telah dikanuriyai anak 14 orang. bahwa sejak tahun 1985 Termohon sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis/keinginan Pemohon I untuk melakukan hubungan suami istri. Meskipun saat itu Pemohon sudah memiliki anak 6 Orang, namun keinginan Pemohon I untuk melakukan hubungan suami istri seperti awal-awal menikah, sedangkan Termohon mulai berkurang keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri dengan termohon I;

Pada tahun 1986, Pemohon II mondok di pesantren Pemohon I dan sekaligus sebagai santri Pemohon I, bahwa selain sebagai santri Pemohon II juga diberi tugas untuk membantu mengurus keadaan rumah tangga Pemohon I. setelah sekitar 2 tahun Pemohon I membantu mengurus rumah tangga Pemohon I. lama-kelamaan Pemohon I berniat menikahi Pemohon II;

Keinginan Pemohon I tersebut disampaikan pada Termohon dan ternyata termohon tidak keberatan dan .menyetujuinya termasuk Permohon II tidak keberatan di nikahi Pemohon I.

Pada tanggal 15 juli 1989 Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadai wali adalah ayah Pemohon II, sudah meninggal dunia (tahun 1994) saksi I masih hidup Saksi II masih hidup, dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,-

keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menjadikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhalang, demikian juga hubungan Pemohon I dengan Pemohon III;

Proses permohonan izin beristri lebih dari satu diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah Agama Pasuruan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Juli 2007 Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan pengesahan poligami dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,00;
2. Pada tanggal 20 juli 2007 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Dra. Azizah Bajuber, S.H., setelah membaca surat permohonan tertanggal 19 Juli 2007 Nomor 578/Pdt.G/2007/PA.Pas menunjuk :
 - a. Drs. H. Mu'ayyad, S.H. sebagai ketua majelis
 - b. Dra. Hj. Lulu' Rodiyah sebagai hakim anggota
 - c. Dra. Muslimatul Umaroh sebagai hakim anggota
3. Pada tanggal 23 Juli 2007 Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Machfudz, S.H. setelah membaca penetapan ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 578/Pdt.G/PA.Pas menugaskan saudara Haries Chozin, S.ag. sebagai panitera pengganti.
4. Pada Tanggal 23 juli 2007 ketua majelis menentukan:
 - a. Hari pemeriksaan perkara dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang dimuka persidangan pengadilan

- c. Surat keterangan penggasilan Pemohon I yang di keluarkan oleh kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, tertanggal 16 Juli 2007.
 - d. Asli surat keterangan izin istri I (termohon) kepada suami (Pemohon I) untuk menikah lagi dengan istri II (Pemohon II) tertanggal 19 Juli 2007.
 - e. Asli surat keterangan izin istri I (termohon) dan Istri II (Pemohon II) kepada suami (Pemohon I) untuk menikah lagi dengan istri III (Pemohon III) tertanggal 8 agustus 2007 bermaterai.
 - f. Asli surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 19 juli 2007 bermaterai.
 - g. Surat kematian dari wali Pemohon II yang meninggal Bulan Rojab Tahun 1994.
 - h. Surat kematian wali dari Pemohon III pada tanggal 27 Mei Tahun 2004.
2. Alat bukti saksi:
- a. Saksi I, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan usaha tokoh, alamat Desa Sukodono, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan.
 - b. Saksi II, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekrjaan swasta, alamat Trajeng, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan.
 - c. Saksi III, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, alamat di Desa Tenggilisrejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.
 - d. Saksi IV, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kersa, alamat Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan.

Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka hakim pengadilan agama memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami apat mengajukan banding dan kasasi.⁶

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara sah hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II poligami pertama yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 15 juni 1989;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III poligami kedua yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 25 pebruari 1992;
4. Memerintakan kepada Pemohon I, untuk mencatatkan perkawinannya tersebut diatas kepada Kantor Urusan Agama Kesamatan Kraton Kabupaten pasuruan dan memerintakan pula kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut berdasar putusan ini

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 4 2005), h. 236-237

Termohon sering menolak karena kecapekan, hal ini menurut hakim majelis Termohon dapat di kategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 ayat huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka terbukti ada alasan bagi Pemohon untuk melakukan Poligami dengan Pemohon II

Demikian pula alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon III adalah karena Termohon sebagai istri I dan juga Pemohon II sebagai istri kedua sering menolak melayani Pemohon I dalam hubungan biologis dengan alasan capek, dan di persidangan hal ini di akui oleh Termohon sebagai istri pertama dan Pemohon II sebagai istri kedua bahwa mereka menolak karena kecapean, hal ini menurut majelis hakim Termohon dan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai, sehingga sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam maka terbukti ada alasan bagi Pemohon I untuk melakukan Poligami dengan Pemohon III tersebut. Adapun syarat-syarat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri

Berdasarkan surat bukti dan juga keterangan saksi yang dipersidangan ternyata isinya telah dakuui kebenarannya oleh termohon maupun oleh Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dalam pernikahannya dengan Pemohon II telah mendapat ijin dari termohon sebagai istri I dan telah terbukti pula bahwa Pemohon I dalam pernikahannya dengan Pemohon III, telah mendapat izin dari istri-istrinya yaitu Termohon dan Pemohon II.

2. Adanya kepastian bahwa Pemohon I mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri maupun anak-anak mereka.

Berdasarkan surat bukti, dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, terbukti bahwa Pemohon I sebagai pengasuh pondak pesantren memiliki penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, selain itu memiliki 5 Hektar sawah dan kebun mangga. Hal ini menurut majelis Pemohon telah berhasil membuktikan adanya kepastian bahwa Pemohon I mampu menjamin keperluan hidup istri-istri mapun anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan Anak-anak mereka

Pemohon I telah menyatakannya secara lisan di persidangan sebagaimana di persidangan sebagai mana isinya telah dituangkan pula tertulis

dalam surat bukti sehingga oleh karenanya menurut majelis Pemohon I dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa untuk melakukan poligami kesatu dan kedua, Pemohon I telah cukup dan telah memenuhi syarat utama dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula mengenai perkawinan poligami Pemohon I dengan Pemohon II maupun dengan Pemohon III, telah terbukti memenuhi syarat dan rukunnya menurut Agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 kompilasi hukum Islam maka Perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

TENTANG PENGESAHAN NIKAH DALAM

PERKAWINAN POLIGAMI

A. Analisis terhadap Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa *isbat* nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya:¹

1. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan antara sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan nikah menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah:

¹ IKPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2005), h. 8

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan pengesahan nikah (*iṣbāt* Nikah);
5. Penetapan wali adhol, dsb

1. Proses pemeriksaan permohonan *isbāt* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
2. Apabilah dalam proses pengadilan di atas diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan wanita lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubahnya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

poligami di atas masuk dalam katagori komulasi perkara, karena dalam permohonan di atas ada dua masalah, yang pertama masalah *isbāt* nikah dan yang kedua masalah poligami.

Sedangkan perkara yang dapat digabungkan (komulasi perkara) menurut Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 7 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syariah jo Pedaman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama huruf e poin 13 dan 14 Buku II Tahun 2007 hanya mengenai:

1. Permohonan pengesahan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan dengan permohonan cerai talaq ataupun sesudah ikrar talaq diucapkan. (Pasal 66 ayat 5)
2. Gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat 1)
3. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara perceraian diputus bersama-sama dalam satu putusan. (Huruf e poin 13 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2007)
4. Pengesahan nikah dapat pula digabung kan dengan gugatan warisan. (Poin 14 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2007).

Sebenarnya, apabila merujuk kepada apa yang diatur dalam Pasal 49 huruf a, Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syariah jo Pedemoan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama huruf e Poin 13 dan 14 Buku II Tahun 2007 seharusnya hakim menolak pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, karena di dalam perundang-undangan di atas tidak satupun yang mengatur tentang pengesahan nikah dalam perkawinan poligami.

Karena pada prinsipnya, dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang

³ Muayyad, Hakim ketua pada perkara no. 578/Pdt.G/2007/PA.Pas, Wawancara. Senin, 5 Januari 2009 di Pengadilan Agama Pasuruan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat dijelaskan bahwa data atau putusan nomor :578/Pdt.G/2007/PA.pas yang berhasil di peroleh sebagai berikut;

Pemohon I sebagai suami menikah dengan termohon pada Tahun 1975 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan purworejo, kota pasuruan dan dan selama menikah mereka dikaruniai 14 orang anak, sejak tahun 1985 termohon sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon.

Pada Tanggal 15 Juni Tahun 1989 Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan persetujuan termohon tetapi pernikahan ini dilakukan menurut agama saja, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pernikahannya ini mereka dikaruniai 12 orang anak.

Pada Tanggal 25 Pebruari Tahun 1992 Pemohon I menikah lagi dengan pemohon III, hal ini dikarenakan Pemohon I takut melanggar aturan Agama apabila ingin dekat dekat dengan Pemohon III. Dan pernikahan ini tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dan pernikahan ini mendapat ijin dari termohon dan pemohon. Dari pernikahan ini mereka di karunia 6 orang anak.

Alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II adalah karena Termohon sering menolak melayani Pemohon I dalam hubungan biologis dengan alasan capek, dan di persidangan ternyata diakui oleh Termohon bahwa termohon sering menolak karena kecapekan. Demikian pula alasan Pemohon untuk berpoligami dengan Pemohon III, adalah karena Termohon sebagai istri I

dan juga Pemohon II sebagai istri kedua sering menolak melayani Pemohon I dalam hubungan biologis dengan alasan capek, dan di persidangan hal ini diakui oleh Termohon sebagai istri kedua bahwa mereka menolak karena kecapekan. Hal ini menurut hakim majelis, Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti ada alasan bagi pemohon untuk melakukan Poligami dengan Pemohon II.

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka terbukti ada alasan bagi pemohon untuk melakukan poligami dengan Pemohon III tersebut. Adapun syarat-syarat kumulatif yang diharuskan adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa pemohon I mampu menjamin keperluan hidup istri-istri maupun anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Ditegaskan pada Pasal 56 ayat I Kopilasi Hukum Islam, menyatakan, Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Bila majelis hakim berpedoman pada pasal tersebut, seharusnya, majelis hakim menolak permohonan pengesahan poligami ini, karena, izin poligami bisa diterima sebelum/akan melakukan poligami. Sedangkan dalam perkara Nomor : 578/Pdt.G/2007/PA.pas. pernikahan poligami tersebut telah dilakukan dibawah tangan dan Sah menurut Agama, dan seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami ini, dan menyatakan status perkawinan antara Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III seperti semula, sah menurut Agama saja dan tidak sah menurut Negara.

Ditegaskan pada Pasal 56 ayat I Kopilasi Hukum Islam, menyatakan, Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Bila majelis hakim berpedoman pada pasal tersebut, seharusnya, majelis hakim menolak permohonan pengesahan poligami ini, karena, izin poligami bisa diterima sebelum/akan melakukan poligami. Sedangkan dalam perkara Nomor : 578/Pdt.G/2007/PA.pas. pernikahan poligami tersebut telah dilakukan dibawah tangan dan Sah menurut Agama, dan seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami ini, dan menyatakan status perkawinan antara Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III seperti semula, sah menurut Agama saja dan tidak sah menurut Negara.

majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Poin 4 Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2007 Buku II. Adapun pertimbangan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara *isbāt* nikah adalah; *pertama*, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2007. *Kedua*, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor. 3 tentang Ekonomi Islam, perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Analisis terhadap pengesahan nikah dalam perkawinan poligami dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam menggabulkan permohonan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami tidaklah tepat, karena tidak satupun perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur masalah tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan bagi hakim yang menangani perkara masalah perdata, khususnya masalah pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, tentunya tidak harus langsung memakai Pasal-Pasal sebagaimana peraturan yang ada, melainkan harus dikaji terlebih dahulu pasal-pasal tersebut sesuai dengan hukum Islam dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kenyataan yang ada agar hukum bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Realitas yang ada di lapangan menunjukan masih ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para hakim secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan membinanya, agar terus-menerus mengupayakan peningkatan profesionalitas para hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan.

